

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I dari penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian. Penelitian ini akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

1.1. Latar Belakang Masalah

Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir. H. Joko Widodo, membawa cita-cita besar Bangsa Indonesia menjadi sebuah negara maju dengan melakukan kebijakan pendukung yang dirasa krusial untuk mendukung keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia maju. Melalui kerjasama para kabinet Indonesia maju, pemerintah memfokuskan pada dua fokus utama pembangunan yaitu pada percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada periode kepemimpinan yang kedua, Presiden Jokowi memfokuskan percepatan pembangunan kualitas SDM namun dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan infrastruktur. Keselarasan pembangunan infrastruktur memegang peran yang sangat penting dalam memacu percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi baik tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pembangunan SDM yang baik. Menurut Sonny Sumarsono (2003) dalam Tufa (2018) SDM memiliki beberapa arti yaitu SDM sebagai kinerja pekerjaan yang berkontribusi terhadap keberlanjutan produksi dan

SDM sebagai populasi manusia yang terdiri dari orang-orang yang dapat memberikan jasa. Dalam proses pembangunan kualitas SDM, pemerintah perlu menciptakan rencana dan kebijakan pada pembangunan sektor ekonomi yang berpijak pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat sasaran. Salah satu alat ukur untuk melihat bagaimana keberhasilan suatu daerah dalam upaya meningkatkan SDM adalah dengan melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah ukuran yang memuat sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap hasil-hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang kemudian IPM di dalam laporan *Human Development Report* (HDR) secara rutin diterbitkan di setiap tahunnya. IPM memuat tiga indikator yang mencerminkan dimensi indeks diantaranya, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut BPS (2022) peningkatan angka IPM di Indonesia cukup signifikan yaitu mencapai 0,49% pada tahun 2021 dan 0,86% pada 2022, dimana angka ini melebihi dari tingkat IPM pada tahun 2020 yang hanya mencapai 0,03% karena pada saat itu rendahnya angka tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia.

Kalimantan Barat termasuk dalam daftar provinsi dengan tingkat IPM terendah yaitu menduduki peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Tingkat IPM Provinsi Kalimantan Barat memiliki status yang tergolong status sedang dengan tingkat IPM pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,63 point, di mana angka ini lebih

besar dari tingkat IPM 2021 yaitu sebesar 67,90 point atau dapat diartikan bahwa tingkat IPM di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada tahun 2022. Angka IPM ini masih cukup jauh jika dibandingkan provinsi lain seperti Jakarta yang merupakan provinsi dengan angka IPM tertinggi pada tahun 2022 yaitu 81, 65 point.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Point)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sambas*	66.61	67.02	67.03	67.10	67.95
2	Bengkayang	66.85	67.57	67.87	68.04	68.74
3	Landak	65.45	65.96	65.98	66.21	67.17
4	Mempawah	64.90	65.50	65.74	66.03	66.94
5	Sanggau	65.15	65.67	65.77	66.20	66.91
6	Ketapang	66.41	67.16	67.17	67.43	67.92
7	Sintang	66.07	66.70	66.88	66.93	67.86
8	Kapuas Hulu	65.03	65.65	65.69	65.75	66.70
9	Sekadau*	64.69	64.34	64.76	64.93	65.58
10	Melawi	65.05	65.54	65.55	65.87	66.81
11	Kayong Utara	61.82	62.66	62.68	62.90	63.81
12	Kubu Raya	67.23	67.76	67.95	68.16	68.91
13	Kota Pontianak	78.56	79.35	79.44	79.93	80.48
14	Kota Singkawang	71.08	71.72	71.94	72.11	72.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2022)

Provinsi Kalimantan Barat secara administratif terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 2 kota. Dari penjabaran data yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat IPM dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat bervariasi, terdapat kabupaten/kota yang menunjukkan tren yang terus meningkat dan ada pula kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tren fluktuasi tingkat IPM terjadi di Kabupaten Sambas yang mengalami penurunan

IPM pada tahun 2020 dan Kabupaten Sekadau pada tahun 2019 dan kabupaten/kota lainnya menunjukkan tren positif. Angka IPM tertinggi tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 80,48 point yang dipegang oleh Kota Pontianak, kemudian kabupaten/kota yang memiliki IPM terendah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kayong Utara dengan angka sebesar 63,83 point. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi penting untuk memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerahnya untuk dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan setor-sektor penunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Percepatan dan pemerataan pembangunan pada sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pengangguran juga diduga berkontribusi terhadap tingkat IPM suatu daerah/wilayah.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi regional adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang merata akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi baik dari barang maupun jasa yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan PDRB suatu daerah merupakan indikator kemampuan daerah tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari besarnya melalui PDRB (Tufa, 2018). PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tersebut, dan PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar (Arifin, 2009). Tingkat pertumbuhan output (PDRB) yang tinggi menyebabkan perubahan perilaku konsumen untuk memenuhi

permintaan. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit IPM yang disebut indeks pendapatan, sehingga PDRB memiliki dampak positif terhadap IPM di mana semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin tinggi pula IPM-nya (AyuBhakti,N. A., dkk, 2014).

Pembangunan tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan mengenai produksi barang dan jasa saja, di dalam pembangunan manusia juga terdapat hubungan yang erat antar indikator lain seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang juga merupakan sumber daya sering menjadi permasalahan yang bersinggungan dengan masalah kemiskinan di suatu daerah. Kondisi di Kalimantan Barat saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,87 persen poin di mana pada february tahun 2022 tingkat pangangguran terbuka menunjukkan angka sebesar 4,86 persen (BPS, 2022). Pada agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,11 persen (BPS, 2022). Secara teori, jika orang tidak bekerja atau menganggur, mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan pendapatan. Sedangkan pendapatan dari pekerjaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga ketika kebutuhan hidup sudah terpenuhi, maka tidak akan terjadi kemiskinan.

Kemiskinan memiliki dua penyebab, yaitu yang pertama kemiskinan yang disebabkan oleh alam yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat atau manusia seperti adanya keterbatasan SDM misalkan dalam hal keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan. Kemudian juga karena lokasi atau letak geografis di daerah yang terpencil dan tidak dapat diakses yang menyulitkan komunikasi dengan penduduk

yang sudah maju. Penyebab kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah seperti kurang diperhatikannya daerah atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, kesenjangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta kurangnya perhatian terhadap usaha kecil atau usaha mikro ekonomi masyarakat (Suwadi, 2014:25). Dengan kata lain, kemiskinan juga merupakan sebuah kondisi yang penyebabnya tidak diciptakan oleh kehendak dari individu itu sendiri melainkan ada campur tangan dari pihak di luar individu (Kadji, 2012). Dari data yang publikasi oleh BPS Kalbar, secara keseluruhan dari 2018 hingga 2022 jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Tetapi terdapat kenaikan yang terjadi pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 356,51 ribu jiwa atau meningkat 6,3 ribu jiwa jika dibandingkan pada Maret 2022 (BPS, 2022).

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan pembangunan sosial ekonomi dan ketersediaan fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan produktivitas sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana variabel kemiskinan, PDRB dan pengangguran mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten/kota Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di dalam bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022.
- 2) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022.
- 3) Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022.
- 4) Bagaimana Kemiskinan, PDRB dan Pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Kemiskinan, PDRB dan Pengangguran secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Bagi Penulis

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi, terutama dalam mengorganisir fakta dan data dengan lebih jelas, dan membangun keterampilan analisis yang baik.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya atau pembaca

Bagi peneliti selanjutnya atau pembaca diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan atau bahan referensi dan pembandingan yang berguna untuk studi / penelitian lainnya yang terkait dengan penulisan ini sehingga penelitian ini dapat terus berkembang lebih baik.

- 3) Pemerintah

Bagi pemerintah atau pihak otoritas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana

kemiskinan, PDRB dan pengangguran mempengaruhi indeks pembangunan manusia, khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
- 2) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
- 3) Diduga pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.
- 4) Diduga kemiskinan, PDRB dan pengangguran bersama-sama berpengaruh terhadap IPM Provinsi Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2018-2022.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab yang pertama ini, berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalahn tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang konsep serta teori yang berkaitan mengenai permasalahan dari penelitian, juga terdapat mengenai referensi pustaka dari penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Hal-hal yang dibahas pada bab ini berkaitan dengan data dan alat serta tahapan analisis. Adapun mencakup lokasi penelitian, periode penelitian, jenis dan sumber data, tahapan analisis, metode analisis, dan alat analisis data, serta definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dimuat secara rinci mengenai hasil penelitian berdasarkan alat analisis yang digunakan. Kemudian, terdapat pembahasan mengenai hasil dari penelitian secara teori dan statistik sehingga dapat diketahui tercapai atau tidak, tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil dan pembahasan yang digunakan sebagai bukti pembenaran hipotesis. Selain itu terdapat saran yang relevan baik untuk pembaca maupun untuk peneliti selanjutnya.